

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi Infrastruktur Jalan di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Deli Serdang masih sangat lemah dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera seperti Provinsi Sumatera Barat yang menjadi Daerah Terbaik pertama dan Bengkulu yang menjadi Daerah Terbaik ketiga sebagai Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah 2021.<sup>1</sup> Keterbelakangan pembangunan jalan di Kabupaten Deli Serdang masih terlihat terutama pada jalan pedesaan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang menghubungkan suatu tempat ketempat lainnya. Jalan di butuhkan sebagai fasilitas fisik penunjang kegiatan ekonomi yang menyediakan aksesibilitas ke berbagai kegiatan komersial industri dan sosial lainnya.

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah mewujudkan Visi Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religious dan rukun dalam kebhinekaan. Maka upaya untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang infrastruktur yang berdasarkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus memperhatikan kondisi prasarana seperti jalan yang menghubungkan sentra-sentra pangan, industri dan pariwisata mengingat

---

<sup>1</sup> Kementrian PPN/Bappenas. “*Daerah Terbaik Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah 2021*”. june 21,2021,<https://peppd.bappenas.go.id/media.news/Daerah-Terbaik-Penerima-penghargaan-Pembangunan-Daerah-2021>.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang menjadi lumbung pangan nasional di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, jalan yang baik dan memadai sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas masyarakat Kabupaten Deli Serdang tidak terkecuali daerah pedesaan. Salah satu program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang disampaikan dalam tema musrenbang RKPD kabupaten deli serdang tahun 2021 yaitu masyarakat yang sejahtera melalui infrastruktur terintegrasi dan transformasi ekonomi.<sup>2</sup>

Ujung Rambe adalah salah satu dari 33 desa yang berada di Kabupaten Deli Serdang dengan tipologi desa swasembada yang mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah petani dan karyawan perkebunan. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan akses penting yang di butuhkan oleh Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari misi yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa dengan transparan. Menurut pengamatan peneliti masih banyak ditemukannya jalan rusak seperti, jalan berlubang yang mengganggu kenyamanan dalam berkendara, pembangunan jalan yang belum terselesaikan, jalan tanah yang becek ketika turun hujan dengan total keseluruhan sepanjang 5.700 meter di Desa Ujung Rambe.

Adanya keterbatasan dan masalah yang ditemukan tersebut menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat desa yang bermatapencaharian sebagai petani, mengganggu kenyamanan bagi pengendara, serta dapat menghambat proses

---

<sup>2</sup>Website Resmi Kabupaten Deli Serdang, "*Pemkab Deli Serdang Gelar Musrenbang RKPD 2021 Melalui Video Conference*," April 16, 2021, <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-852-pemkab-deli-serdang-gelar-musrenbang-rkpd-2021-melalui-video-conference.html>.

belajar-mengajar bagi pelajar. Faktanya beberapa masyarakat desa belum merasakan manfaat yang total dari pembangunan infrastruktur jalan itu sendiri.

Di bawah ini adalah data pembangunan jalan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sampai tahun 2021.

**Tabel 1.** Data Pembangunan Desa Ujung Rambe

| Karakteristik Jalan                            | Keterangan   |
|--|--|
| Jalan aspal                                    | --+ 5.750 m<br>Pada Tahun 2010: Dusun 1, Dusun 3<br>Pada Tahun 2018: Dusun 2, Dusun 5<br>Pada Tahun 2020: Dusun 2          |
| Jalan paving block                             | --+ 1.474 m<br>Pada Tahun 2015: Dusun 2, Dusun 3<br>Pada Tahun 2016: Dusun 2, Dusun 3<br>Pada Tahun 2021: Dusun 1, Dusun 3 |
| Jalan rabat beton                              | --+ 970 m<br>Pada Tahun 2012: Dusun 2<br>Pada Tahun 2015: Dusun 1<br>Pada Tahun 2017: Dusun 3<br>Pada Tahun 2021: Dusun 4  |
| Jalan tanah                                    | --+ 5.000 m  |
| Jalan rusak                                    | --+ 400 m  |
| Jalan yang belum terselesaikan                 | --+ 300 m  |
| Jumlah Kecelakaan yang terjadi pada tahun 2021 | 7 Kecelakaan Ringan akibat kondisi jalan yang rusak dan berlubang.   |

Sumber: Hasil Wawancara Bersama Kepala Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Pada tanggal 29 Desember 2021

#### Deskripsi Penelitian Terdahulu Serta Perbandingan Dengan Penelitian ini

Penelitian yang dilakukan oleh Murba pada tahun 2017 dengan judul: “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erencinong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”. Penelitian ini membahas tentang implementasi pembangunan infrastruktur di desa erencinong yang masih belum memenuhi harapan masyarakat karena belum terlihat perubahan dari beberapa

tahun silam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian murba dengan penelitian ini adalah pada tujuan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada keberhasilan implementasi program pembangunan infrastruktur jalan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif.

Lalu Penelitian yang dilakukan oleh Fathani Muttakin pada tahun 2018 dengan judul: “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo”. Penelitian Fathani memberikan jawaban hipotesis bahwa variable pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi pendapatan masyarakat desa dengan Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan masyarakat Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Perbedaan penelitian Fathani dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Fathani merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Kemudian Jurnal Wahyu Kuniawan, Karjuni Dt. Maani tahun 2019 dengan judul: “Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn”. Hasil pembahasan mengetahui standar, tujuan, dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi

antar organisasi, lingkungan ekonomi dan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dibidang pembangunan jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan jalan di Desa Muara Delang dengan menggunakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini dapat dilihat dari hasil pembahasan, yang mana jurnal Wahyu Kurniawan membahas tentang sasaran kebijakan dan implementasi kebijakan sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Adapun perbedaan lainnya ditemukan dari teori yang dipakai dimana dalam penelitian Wahyu Kurniawan memakai teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn sedangkan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle. Persamaan dengan penelitian ini ialah dari metode yang dipakai dalam penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sedangkan Jurnal dari Megawati Cindy Rorimpandey, Ismail Nurdin pada tahun 2019 dengan judul: "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara". Menguraikan pembahasan tentang Implementasi program PPIP di Desa Lopana Satu belum berjalan dengan maksimal karena ketidakpercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program akibat dari kegagalan program pembangunan pada periode sebelumnya. Tujuan penelitian mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian program PPIP ini. Adapun perbedaannya dengan penelitian Megawati

terletak pada pembahasan dimana fokus pembahasannya adalah tentang implementasi kebijakan program sedangkan penelitian ini berfokus pada keberhasilan implementasi program. Persamaannya ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif.

Dan Penelitian oleh Rizki Aryanda tahun 2020 dengan judul: “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Alokasi Dana Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. Hasil dari pembahasan ini tentang pembangunan infrastruktur jalan di desa Pulau Kijang yang masih belum optimal namun sudah mulai membaik dari tahun sebelumnya, serta masyarakat masih melihat kegagalan didalam pembangunan jalan seperti pengurangan volume semen yang menyebabkan jalan tidak bertahan lama. Tujuan penelitian yaitu mengetahui implementasi program pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan alokasi dana desa di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Provinsi Riau. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan dimana penelitian Rizky berfokus pada alokasi dana desa sedangkan penelitian ini berfokus pada keberhasilan implementasi program. Persamaan dengan penelitian yang ini terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan metode deskriptif-kualitatif.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA UJUNG RAMBE KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dituliskan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 Berdasarkan Proses dan Hasil yang dicapai”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian yaitu: “Untuk mengetahui Keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 Berdasarkan Proses dan Hasil yang dicapai”.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

Manfaat teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berfokus pada kajian kebijakan publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

Manfaat praktis:

1. Bagi pemerintahan desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh aparatur pemerintahan desa dan menjadi

sumbangsih peneliti terhadap input bagi pemerintahan desa dalam membangun infrastruktur jalan khususnya pada pemerintahan desa di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan menjadi syarat menyelesaikan program strata 1 (S1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori digunakan untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sehingga peneliti memiliki kemampuan untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi penelitiannya ke dalam hipotesis. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif penelitimencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.<sup>3</sup>

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Program.

---

<sup>3</sup> Achmad Barokah Pohan, 2019. “*Metode Penelitian Modul Pembelajaran*”. Hal 53



## 1. Teori Implementasi Program

Menurut Oemar Hamalik (2018): “Implementasi adalah penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap”.<sup>4</sup> Dengan demikian, Implementasi merupakan suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Dalam *oxford advance learner’s dictionary* sebagai yang dicatat oleh Oemar Hamalik penulis buku yang berjudul “Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum” bahwa: “Implementasi adalah *“put something into effect”* atau penerapan sesuatu yang memberikan efek”.<sup>5</sup> Jones (1996) mengatakan bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter (1975): *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah).<sup>6</sup> Kesimpulannya adalah Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu kegiatan yang telah dirancang. Program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.<sup>7</sup> Jones (1996) berpendapat bahwa: “program adalah unsur pertama yang harus ada

---

<sup>4</sup> Oemar Hamalik, 2018. “Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum”. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal.110

<sup>5</sup> Ibid Hal.110

<sup>6</sup> Mulyadi, 2019. “Those Activities Direct Toward Putting A Program Into Perfect”. Jakarta: Alfabeta.hal.56

<sup>7</sup> Yulia Annisa, 2020. “Implementasi Program Jalan Pedesaan Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Provinsi Riau”. hal.29

demi terciptanya suatu kegiatan”. Lebih lanjut Jones juga menjelaskan bahwa di dalam program memuat beberapa aspek, yaitu mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten (dalam Jones 1996) bahwa: *“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action anactivities for achieving averral policy abjectives”* atau suatu program adalah sekumpulan proyek yang berhubungan dan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa: Program adalah tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari pelaksana programnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Model-Model Implementasi Program

### a. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn (1975)

Model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan oleh Van Metter dan Van horn disini ialah model top-down. Model ini mengumpamakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja dari kebijakan publik. Karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Variabel terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yang juga harus diperhatikan ialah menilai hasil sejauh mana lingkungan dapat berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik yang di tetapkan. Lingkungan yang dimaksud disini meliputi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

### b. Model Charles O. Jones (1986)

Model ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- 1.) Organisasi: pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

---

<sup>8</sup> Ibid hal.135

- 2.) Interpretasi: menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- 3.) Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

c. Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980) Implementasi *“is a political and administrative process”*. Keberhasilan suatu implementasi program kebijakan dapat diukur berdasarkan proses (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil).

Hal ini dapat dilihat dari:

- 1.) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2.) Apakah tujuan kebijakan telah tercapai.

**F. Kerangka Konsep**

Menurut Merilee S. Grindle (1980): “Keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat diukur berdasarkan proses (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil)”.

1. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara:
  - a. tata cara pelaksanaan: berupa serangkaian susunan kegiatan dalam melaksanakan suatu program yang dibuat.
  - b. agen pelaksana: sebagai penyedia dan pelaksana dari program tersebut.

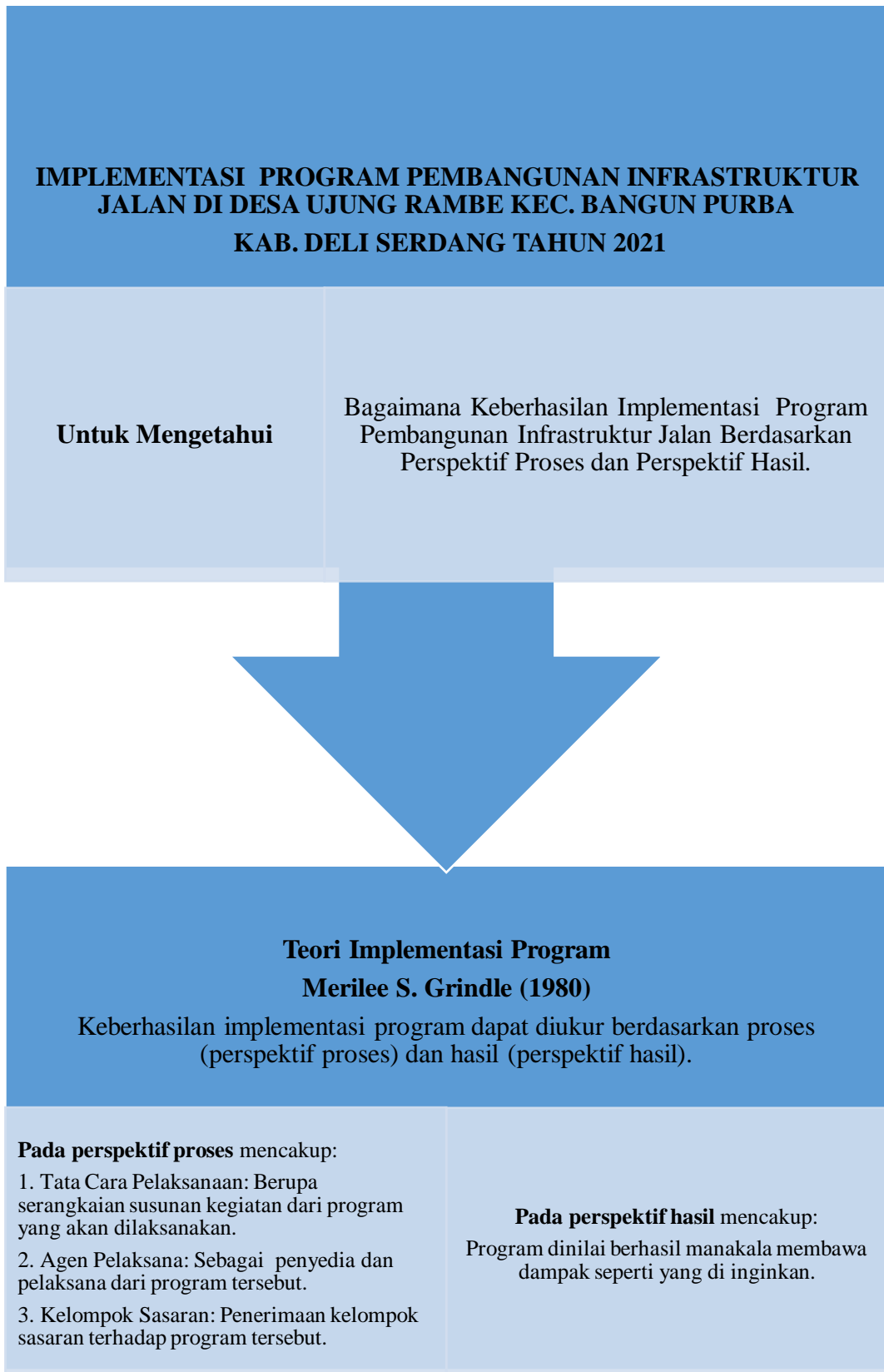
c. kelompok sasaran: penerimaan kelompok sasaran terhadap program yang akan dilaksanakan.

2. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan.

Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi program dapat dikatakan berhasil apabila telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Adapun alasan peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam penelitian ini dikarenakan konteks implementasi yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle (1980) berorientasi pada pelaksanaan program, sehingga ada relevansi untuk mengukur keberhasilan implementasi program pembangunan berdasarkan perspektif proses serta perspektif hasil, dibandingkan dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (1975) yang lebih menekankan pada kebijakan, atau teori dari Charles O. Jones (1986) yang lebih berfokus pada aktivitas internal struktur birokrasi. Dengan demikian keberhasilan implementasi program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang akan dapat dideskripsikan dengan baik.

## Bagan 1. ALUR PIKIR



## **G. Proposisi**

Proposisi dalam penelitian ini adalah keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Infastruktur Jalan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ditentukan berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan dengan jelas keberhasilan implementasi program berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.<sup>9</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

### **3. Informan Penelitian**

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif, tidak mengenal istilah pengambilan sampel dari populasi karna penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi, namun bertujuan menggali informasi secara mendalam sehingga sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Adapun fungsi dari informan dalam penelitian adalah memberikan

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, 2018. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 11

informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian.

Informan dalam penelitian ini terbagi atas 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Informan kunci

Yaitu seseorang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang proses dan hasil yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena yang terjadi secara garis besar, tetapi juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini informan kuncinya adalah: Kepala Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

b. Informan utama

Yaitu seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail serta terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan utama adalah: BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

c. Informan Tambahan

Yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi tambahan atau informasi sekunder tentang proses dan hasil yang dicapai sebagai pelengkap dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini informan tambahannya adalah: Tokoh Remaja, Ketua Organisasi, Tokoh Agama, Tokoh Adat Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.



**Tabel 2.** Data Informan Penelitian

| No Urut | Nama             | Kelompok Informan | Keterangan                        | No Informan |
|---------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1.      | Dian Ika         | Kunci             | Kepala Desa Ujung Rambe           | A.1         |
| 2.      | Agung Arisandi   | Utama             | Sekretaris Desa Ujung Rambe       | B.1         |
| 3.      | Swaji            | Utama             | Ketua BPD Desa Ujung Rambe        | B.2         |
| 4.      | Muhammad Ari     | Utama             | Kepala Dusun Desa Ujung Rambe     | B.3         |
| 5.      | Darwan           | Utama             | Tokoh Masyarakat Desa Ujung Rambe | B.4         |
| 6.      | Budi Saputra     | Tambahan          | Ketua Organisasi Desa Ujung Rambe | C.1         |
| 7.      | Muhammad Irfan   | Tambahan          | Tokoh Pemuda Desa Ujung Rambe     | C.2         |
| 8.      | Bakri Lubis      | Tambahan          | Tokoh Agama Desa Ujung Rambe      | C.3         |
| 9.      | Alisati Nasution | Tambahan          | Tokoh Adat Desa Ujung Rambe       | C.4         |

Sumber: Purposive Sampling

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk menjelaskan isi dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengertian dibawah ini:

##### **a. Observasi**

Jenis observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan pengamatan tentang proses dan hasil yang dicapai secara dekat dan terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan. Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah mengetahui keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Infastruktur Jalan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 berdasarkan proses dan hasil yang dicapai dalam keadaan atau kejadian sesungguhnya.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan mempersilahkan informan menyampaikan data maupun informasi tanpa dibatasi apapun. Bertujuan menggali informasi dan data tentang keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Infastruktur Jalan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.

Tabel 3. Pedoman Wawancara

| Berdasarkan Proses       | Pertanyaan   | Informan  |
|--------------------------|--|---|
| a. Tata cara Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi prioritas perencanaan pembangunan Desa Ujung Rambe pada tahun 2021?</li> <li>2. Mengapa jalan yang menjadi prioritas perencanaan pembangunan?</li> <li>3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Ujung Rambe?</li> <li>4. Apa saja yang harus disusun sebelum melaksanakan pembangunan jalan di Desa Ujung Rambe?</li> <li>5. Berapa anggaran Dana Desa Ujung Rambe pada tahun 2021? Dan berapa yang dialokasikan ke pembangunan jalan?</li> <li>6. Berapa total jalan yang seharusnya dibangun pada tahun 2021? Dan berapa jumlah yang terealisasi?</li> <li>7. Mengapa tidak terealisasi?</li> </ol> | Informan dalam wawancara mengenai tata cara pelaksanaan berjumlah 3 orang yang terbagi atas kelompok informan, yaitu :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa Ujung Rambe (A.1)</li> <li>2. Sekretaris Desa Ujung Rambe (B.1)</li> <li>3. Ketua BPD Desa Ujung Rambe (B.2)</li> </ol>   |
| b. Agen Pelaksana        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur dalam melaksanakan pembangunan jalan di Desa Ujung Rambe?</li> <li>2. Siapa saja yang terlibat sebagai pelaksana dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ujung Rambe pada tahun 2021?</li> <li>3. Bagaimana keterlibatan masyarakat yang dimaksud ?</li> <li>4. Mengapa dikatakan swakelola? Apa swakelola dan bagaimana aturannya?</li> <li>5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan aparat pemerintahan desa terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya pembangunan jalan berlangsung?</li> </ol>   | Informan dalam wawancara mengenai agen pelaksana berjumlah 4 orang yang terbagi atas 2 kelompok informan, yaitu:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa Ujung Rambe (A.1)</li> <li>2. Sekretaris Desa Ujung Rambe (B.1)</li> <li>3. Ketua BPD Desa Ujung Rambe (B.2)</li> <li>4. Tokoh Masyarakat Desa Ujung Rambe (B.4)</li> </ol> |
| c. Kelompok Sasaran      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat apa yang bapak rasakan dengan adanya pembangunan jalan di Desa Ujung Rambe ini?</li> <li>2. Menurut bapak bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan desa dalam kegiatan pembangunan jalan?</li> </ol>  | Informan dalam wawancara mengenai kelompok sasaran berjumlah 2 orang yang terbagi atas 2 kelompok informan, yaitu:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa Ujung Rambe (A.1)</li> <li>2. Tokoh Masyarakat Desa Ujung Rambe (B.4)</li> </ol>  |

Sumber: Pedoman Wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2022

**Tabel 4. Pedoman Wawancara**

| <b>Berdasarkan Hasil</b> | <b>Pertanyaan</b>   | <b>Informan</b>  |
|--------------------------|---|--|
|                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa total jalan yang berhasil dibangun di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021?</li> <li>2. Berapa total jalan yang masih belum terbangun?</li> <li>3. Mengapa ada pembangunan yang belum terselesaikan?</li> <li>4. Apa upaya yang dilakukan aparat pemerintahan desa dalam merealisasikan pembangunan jalan agar sesuai dengan yang sudah ditetapkan?</li> <li>5. Menurut pendapat bapak, apakah aparat pemerintahan desa berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan ini? Berikan alasannya!</li> </ol> | <p>Informan dalam wawancara mengenai perspektif hasil (hasil yang dicapai) berjumlah 9 orang yang terbagi atas 3 kelompok informan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa Ujung Rambe (A.1)</li> <li>2. Sekretaris Desa Ujung Rambe (B.1)</li> <li>3. Ketua BPD Desa Ujung Rambe (B.2)</li> <li>4. Kepala Dusun 4 Desa Ujung Rambe (B.3)</li> <li>5. Tokoh Masyarakat Desa Ujung Rambe (B.4)</li> <li>6. Ketua Organisasi Desa Ujung Rambe (C.1)</li> <li>7. Tokoh Pemuda Desa Ujung Rambe (C.2)</li> <li>8. Tokoh Agama Desa Ujung Rambe (C.3)</li> <li>9. Tokoh Adat Desa Ujung Rambe (C.4)</li> </ol> |

Sumber: Pedoman Wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2022

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto, serta catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

## 5. Teknik Analisa Data

### a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna. Reduksi data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan

Implementasi Program Pembangunan Infastruktur Jalan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.<sup>10</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data berbentuk tabel, gambar, serta bagan yang mempermudah penulis dalam menjelaskan keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Infastruktur Jalan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.

c. Penarikan Kesimpulan

Untuk menyimpulkan keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Infastruktur Jalan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan ini peneliti bagi dalam V (LIMA) BAB, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Alur Pikir, Proposisi, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>10</sup> Miles dan Huberman, 2018. "*Analisis Data Kualitatif*". Jakarta: Universitas Indonesia. Hal 16

**BAB II: Uraian Teoritis**

Berisi tentang definisi dan penjelasan tentang keberhasilan implementasi program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 berdasarkan proses dan hasil yang dicapai.

**BAB III: Deskripsi Lokasi Penelitian**

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

**BAB IV: Analisis Hasil Penelitian**

Menguraikan hasil penelitian berupa penyajian data berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang mendukung pemikiran peneliti.

**BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Menguraikan kesimpulan yang ditarik setelah melakukan penelitian serta saran yang membangun agar penelitian yang dilakukan dapat lebih baik lagi.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Implementasi Program

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pelaksanaan”. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.<sup>11</sup> Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1990) bahwa: “Tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan”. Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input dan outcomes bagi masyarakat.<sup>12</sup> Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.<sup>13</sup> Ripley dan Franklin (dalam Winarno 1996) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). “Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.<sup>14</sup> Grindle

---

<sup>11</sup> Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986. “*Policy Implementation and Bureaucracy*”. second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, hlm 15

<sup>12</sup> Edward III, George C (edited), 1990. “*Public Policy Implementing*”. Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al.hlm 1.

<sup>13</sup>Agostiono. “*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*”. <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 1 Juli 2022, hlm 139

<sup>14</sup>Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. “*Policy Implementation and Bureaucracy*”. second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.

(dalam Winarno 1996) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa: secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menjelaskan makna implementasi: “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.<sup>15</sup> Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Dari berbagai defenisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa:“Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Program adalah sederetan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Program merupakan kegiatan yang di rencanakan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Program merupakan rencana mengenai asas-asas sertausaha yang di jalankan”.<sup>16</sup> Dengan kata lain program adalah sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Program adalah penyusunan

---

<sup>15</sup>Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, 1983. *“Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company”*. USA, hlm 139.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 557.



kegiatan yang telah direncanakan secara seksama. Dalam proses kegiatannya dilaksanakan secara berkesinambungan, yang terbentuk dalam sebuah organisasi dimana didalamnya melibatkan orang banyak.<sup>17</sup> Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Westra (1989) mengatakan bahwa: “Program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”. Siagian (dalam Westra 1989) mengatakan bahwa: “Penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

---

<sup>17</sup>Eko Putro Widoyoko, 2021. “*Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidikan Dan Calon Pendidik*”. Yogyakarta:Pustaka Belajar. Hal. 8

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten (dalam Jones 1996) bahwa: "*A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives*" atau suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa program tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan.

Pakar yang lebih awal memberikan perhatian dan gagasan terhadap masalah implementasi ialah Douglas R. Bunker di depan forum *the American Association for the Advancement of Science* pada tahun 1970. Eugene Bardach mengakui bahwa pada forum itu untuk pertama kali disajikan secara konseptual mengenai proses implementasi sebagai suatu fenomena sosial politik atau yang lazim disebut "*political game*" sekaligus sebagai era pertama dari studi implementasi kebijakan. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Beberapa penulis menempatkan

tahap pengukuran keberhasilan implementasi pada posisi yang berbeda, para pakar dan pemerhati kebijakan yang lain juga mengemukakan urgensi implementasi program, sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang pemikirannya. Namun, apapun perspektif dan latar belakang pemikirannya disepakati bahwa implementasi program merupakan salah satu dari dua sisi mata uang yang menggelinding. Pemahaman ini menjadi acuan dalam menentukan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan atau program dan sekaligus dalam menetapkan kriteria pengukuran keberhasilannya.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980) bahwa: “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.<sup>18</sup> Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn (1975) bahwa: “Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa: Implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome.

---

<sup>18</sup> Grindle, Merilee S. 1980. “*Politic and policy implementation in the third world*”. princeton University Press: New Jersey.

Berdasarkan deskripsi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (1975)<sup>19</sup> bahwa: “Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.

Mengacu pada perspektif Grindle (1980): “Keberhasilan implementasi program dapat dikaji berdasarkan perspektif proses dan hasil yang dicapai”. Menurut Akib dan Tarigan, jika model interaktif implementasi program di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Implementasi mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi program juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi program, beserta output dan outcomenya.

Selain model implementasi di atas, Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model proses implementasi kebijakan atau program. Keduanya meneguhkan pendirian bahwa: perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam bertindak

---

<sup>19</sup> Ibid hal 178

merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.<sup>20</sup> Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yang digunakan yakni: perubahan, control, dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

## **B. Perspektif Implementasi Program**

Pernyataan Merilee S. Grindle (1980) mengenai keberhasilan implementasi program berdasarkan proses dan hasil yang dicapai menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi program dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efisien, kajian-kajian pelaksanaannya menekankan pada proses dan

---

<sup>20</sup>Agostiono, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn". <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, Diakses 14 juni 2022.

hasil yang dicapai sehingga memberikan arah yang jelas bagi penelitian pelaksanaan (implementation research). Pendekatan ini menekankan pada sejauh mana keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari aktivitas implementasi. Namun demikian, sebagaimana model ini mengasumsikan bahwa kebijakan-kebijakan memiliki tujuan yang jelas tetapi dalam kenyataannya, kekurangan dalam pendekatan ini adalah fokusnya kepada para pengambil keputusan yang sering kali memainkan peranan yang marjinal dalam pelaksanaannya.

Sedangkan perspektif ilmu politik seolah-olah mematahkan perspektif yang lain. Perspektif ini berfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara proses dan hasil yang dicapai dengan tujuannya. Grindle memperkenalkan pendekatan proses “perspektif proses” dan pendekatan hasil yang dicapai “perspektif hasil” (Ripley and Franklin, 1996). Ripley menjelaskan bahwa setidaknya terdapat kekurangan dalam model pendekatan ini yaitu: (i) Banyak faktor birokrasi yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, (ii) Adanya program yang tidak di desain dengan baik. Kedua faktor tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Sutu program mungkin saja dapat dikatakan berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan ataupun sebaliknya.

Kritikan-kritikan bahwa model pendekatan keberhasilan implementasi ini ialah mengabaikan fokus kepada para pejabat tetapi, Keunggulan terpenting dari pendekatan ini ialah mengarahkan perhatian kepada apa yang membentuk

keberhasilan suatu program sebagaimana yang telah dilihat bahwa proses dan hasil memiliki peranan penting dalam implementasi program. Perbedaan antara pendekatan ini dengan pendekatan yang lain ialah pendekatan keberhasilan program menurut Grindle terhadap implementasi program kebijakan adalah pendekatan ini memperjelas pemahaman mengenai keberhasilan program yang dapat membantu mahasiswa kebijakan publik pada pengkajian konseptualisasi proses kebijakan.

### **C. Ruang Lingkup Implementasi Program**

Implementasi program merupakan salah satu rangkaian atau proses dari kebijakan publik. Salah satu model implementasi yang dapat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni model yang di kemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Wahab menjelaskan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan. Disamping itu, menurut Nugroho ide dasar implementasi program menurut Grindle (1980) yakni setelah program kebijakan melalui proses transformasi, maka implementasi program dilakukan. Grindle (1980) juga menyatakan bahwa: “Secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan program kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah”.<sup>21</sup> Dengan demikian implementasi program merupakan suatu proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan.

---

<sup>21</sup> Trisnanti, Merista. 2018. “*Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program*”. Jurnal Administrasi Negara Vol1 .Universitas Negeri Surabaya.

Implementasi program berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi program sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam pemangku kepentingan, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh materi program ataupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks administrasi. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dalam kebijakan tersebut, sedangkan proses administrasi terlihat pada proses umum mengenai aksi administratif yang bisa dilihat pada tingkat program.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan kedalam suatu program atau proyek yang dirancang serta telah dibiayai. Implementasi dapat dikatakan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif karena menyangkut beberapa aspek dalam kebijakan yakni: implementator, penerima implementasi, konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi dan sumber daya implementasi yang diperlukan. Model implementasi dari Grindle (1980) juga bersifat menyeluruh, karena tidak hanya fokus pada aspek birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga fokus pada kelompok sasaran. Selain itu, menurut Grindle dalam teori implementasi program, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dilihat dari prosesnya, dengan merujuk pada apakah pelaksanaan



kebijakan sudah sesuai dengan yang ditentukan (design) berdasarkan pada aksi kebijakannya. Sementara dari tercapainya tujuan kebijakan dapat mengacu pada dua faktor yakni dampak kepada masyarakat dan tingkat perubahan yang terjadi pada penerima atau kelompok sasaran kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan keberhasilan suatu implementasi program, maka suatu kebijakan harus mengacu pada aturan menjadi panduan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, berhasil tidaknya suatu program atau kebijakan dapat dilihat dari dampak yang diperoleh masyarakat dan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya setelah memperoleh kebijakan tersebut. Grindle (1980) menjabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi program perlu adanya sinergi tiga variabel atau faktor penting yakni kebijakan dari program tersebut, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Hal ini perlu diwujudkan agar melalui kebijakan yang tepat, maka program dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, proses implementasi program ini sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan dalam teori Grindle (1980) terdiri atas: kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi mencakup hal-hal seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.